

## **BAB IV**

### **CITRA DAN NILAI ERDOGAN**

Bab ini membahas mengenai pengaruh citra dan nilai keislaman Erdogan terhadap keputusannya berpihak kepada Qatar pada krisis diplomatik di Teluk Arab pada 2017. Bab ini akan membuktikan hipotesis yang diperoleh oleh penulis pada penelitian ini.

#### **A. Nilai-nilai islam yang terdapat dalam diri Erdogan**

Menurut (Rahman A. , 2014) Recep Tayyip Erdogan merupakan seorang berkebangsaan Turki yang dilahirkan pada 26 Februari 1954 di sebuah desa kecil yang terletak Istanbul Turki. Erdogan memiliki orang tua yang bernama Ahmed yang berasal dari Butumi Georgia, ia bekerja sebagai seorang penjaga laut Hitam kota Rize. (Biography, 2014) untuk kedua kalinya orang tua Erdogan kembali ke Istanbul pada usianya yang ke 13 tahun dengan harapan masa depan pendidikan bagi kelima putranya yang lebih menjanjikan, terutama dalam hal pendidikan Agama. Erdogan pun belajar di sekolah dasar pada usianya yang ke 13 tahun di sekolah dasar berbasis islam aau yang dikenal dengan *Ibtidaiyyah* bersama anak-anak kota Qasim Pasha. Erdogan menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya pada tahun 1965.

Semasa sekolah, Erdogan mendapat julukan yaitu Syaikh Recep. Julukan tersebut diberikan karena ketika pelajaran tentang pendidikan keislaman, gurunya menanyakan terkait kesediaan murid-muridnya untuk memberikan contoh terkait tata cara Shalat yang benar. Erdogan pada saat itu serentak mengangkat tangan untuk memimpin teman-temannya melakukan Sholat, gurunya akhirnya memberikan selembur Koran yang akan dijadikan sajadah namun Erdogan pada saat itu menolak dikarenakan koran tersebut terdapat gambar seorang perempuan yang sedang berjalan. (Taghian, 2012, hal. 11) Atas sikap *sholeh* yang dimiliki Erdogan tersebut menjadikan ia mendapatkan gelar oleh gurunya sebagai “Syaikh Recep”. Setelah Erdogan menyelesaikan

pendidikan sekolah dasarnya, Ia melanjutkan pendidikannya ke Sekolah menengah Imam Hatib dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1973. Di sekolah Imam Khatib inilah ia belajar mendalami perihal ilmu keagamaan seperti *fiqh*, *aqidah* dan *tajwid*. Ilmu yang diperolehnya selama menempuh pendidikan mampu meningkatkan kemampuannya dalam berbicara dan berpikir. (Taghian, 2012, hal. 11)

Erdogan telah dipersiapkan untuk menjadi pribadi yang agamis sejak ia kecil. Orang tua Erdogan sengaja memilihkannya pendidikan keagamaan sejak dini, hal itu terlihat dari keinginan orang tuanya yang memasukan Erdogan ke Sekolah Imam Khatib. Erdogan membuktikan hal tersebut dengan secara cepat menjadi pribadi yang unggul terutama dalam hal agama. Hal tersebut sesuai dengan harapan orang tua Erdogan yang memilih sekolah keagamaan yang memiliki perpaduan antara pendidikan agama klasik dan modern. (Taghian, 2012, hal. 11) Erdogan yang selama menempuh pendidikan yang berbeda-beda juga turut membantu orang tuanya dengan mencari nafkah. Ketika masih menempuh pendidikan di Sekolah Dasar dan Menengah, Erdogan menjual jus lemon dan semangka di jalan-jalan kota Istanbul. Kemudian ketika sekolah menengah atas Erdogan menjual kue yang ia beli dengan keadaan kering dengan harga murah dan memanaskannya kembali di rumah dan dijual dengan harga sesuai. Saat menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi, ia juga bekerja di pasar kota. (Taghian, 2012, hal. 11)

Meskipun dalam keadaan menempuh pendidikan sembari bekerja ia juga tidak meninggalkan hobinya yaitu bermain sepak bola tetapi tidak menyampingkan pendidikannya. Hal ini di tuturkan Erdogan dan debat dengan Ketua Partai Republik yaitu Deniz Baykal, ia mengatakan “*Tidak ada yang bisa saya lakukan kecuali berjualan semangka dan semolina saat masih belajar di sekolah dasar dan menengah, agar saya dapat membantu orang tua dan bisa menyelesaikan studi saya. Hal ini saya lakukan karena orang tua saya miskin*” (Taghian, 2012, hal. 11) Erdogan sudah

terlibat dalam politik sejak usia muda dan menurut situsnya, dia adalah bagian dari Asosiasi Mahasiswa Turki Nasional selama masa sekolah menengah dan saat berada di Universitas Marmara.

Erdogan menikahi Emine Gulbaran pada tahun 1978 dan dikaruniai dengan dua anak perempuan yaitu Esra dan Sümeyye, serta dua anak laki-laki yaitu Necmettin Bilal dan Ahmet Burak. Menurut Arda Baykal dalam sebuah laporan *House of Commons Library*, karir politiknya dimulai saat dia terpilih sebagai presiden dari *Beyoğlu Youth Branch of the National Salvation Party* atau yang dikenal dengan MSP-*Milli Selamet Partisi* yang merupakan sebuah partai politik Islam pada tahun 1970-an yang ditutup setelah peristiwa kudeta militer pada tahun 1980. Selama kudeta tersebut, ia bekerja sebagai akuntan dan sebagai manajer di sektor swasta. (Taghian, 2012, hal. 11)

Kehidupan demokrasi di Turki di pulihkan pada tahun 1983 melalui *Refah Partisi* (Partai Kesejahteraan) di wilayah Istanbul. Pada tahun 1984, Erdogan terpilih menjadi ketua Partai Kesejahteraan di wilayah cosmopolitan Beyoglu yang terletak di salah satu kota terbesar di Istanbul dan pada tahun 1985, Erdogan menjadi ketua partai di Istanbul serta di tahun selanjutnya ia terpilih menjadi anggota Majelis Kehormatan Partai. Ia juga menjadi calon anggota parlemen dari partai terpilih. Pada tahun 1995 saat diselenggarakannya pemilihan umum tingkat wilayah, Erdogan berhasil terpilih sebagai Walikota untuk wilayah Istanbul raya dan menjadi Presiden Dewan Metropolitan Istanbul Raya. (Taghian, 2012, hal. 11) Kemudian Ia mengambil alih jabatan sebagai seorang Perdana Menteri dari Abdullah Gul dan menjabat hingga pada Agustus 2014.

Nilai-nilai keislaman selalu ia tunjukan saat menjabat di pemerintahan ditandai dengan selama kepemimpinannya ia selalu mempromosikan Islam di seluruh birokrasi Turki dan khususnya di Sekolah-Sekolah. Islamisasi yang dilakukannya

bertujuan untuk mengangkat apa yang dia sebut “generasi religious baru” dan mempromosikan Turki yang lebih islami. (BBC, 2017c) Ia juga melakukan upaya untuk mencari solusi atas masalah Turki yang telah berlangsung lama dengan tuntutan minoritas Kurdi yang besar untuk menghormati dan kebebasan budaya. Ia menggunakan seruan nilai-nilai Islam dalam pemecahan masalah di Turki dan bukan dengan reformasi struktural.

Dalam kehidupan kesehariannya Erdogan dikenal memiliki keimanan yang sangat kuat terhadap agamanya. Dengan keimanan yang sangat kuat tersebut menjadikan Erdogan dapat dikenal sebagai sosok yang berani dan pekerja keras, yang pada akhirnya menjadikannya dapat memperoleh berbagai macam prestasi melebihi ekspektasi bahkan oleh orang-orang terdekatnya sendiri. Dengan menggunakan pendekatan Ideologi keislaman, ia dapat tumbuh menjadi pribadi yang agamis dan selalu mendahulukan kepentingan orang lain dibanding kepentingan pribadinya. Erdogan berpandangan bahwa Islam dalam ilmu Politik, ekonomi dan sosial bukanlah sesuatu yang bersidat ilusi belaka sebagaimana pendapat sebagian orang akan tetapi pandangan islam merupakan suatu realita yang nyata. Ia juga berpandangan bahwa demokrasi sejati akan lahir dari pemikiran islam. (BBC, 2017c)

Penghapusan sistem Khilafah di Turki yang dilakukan oleh Mustafa Kemal menjadi pintu awal sekularisme secara besar-besaran. Mustafa Kemal melakukan reformasi besar-besaran dengan menghilangkan Islam dan berkilbat ke zaman pencerahan barat. (Freely, 2002, hal. 378) Periode revolusi Turki dari islam ke Sekuler dimulai pada tahun 1923 hingga tahun 1950. Pada September dan November tahun 1925 proses reformasi yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Ataturk dalam bidang sosial budaya di Republik Turki dijalankan. Ia mengeluarkan peraturan tentang tata cara berpakaian. Kaum laki-laki dilarang menggunakan pakaian yang bernuansa atau berciri khas keagamaan dan penggunaan topi torbus yang

sebelumnya pada masa kekhalifahan Turki Utsmani merupakan atribut yang biasa digunakan dalam keseharian. Kaum perempuan pun ikut merasakan pertauran yang ditetapkan oleh Atatürk. Ia mengeluarkan peraturan terkait pelarangan pemakaian jilbab. Penggunaan pakaian serta topi diwajibkan seperti yang digunakan oleh bangsa Barat baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian kalender Hijriah pun tidak boleh dipergunakan lagi dan diganti dengan kalender Georgian seperti kalender yang digunakan di negara-negara Barat.

Pada tahun 1926, landasan dasar hukum masyarakat Turki yang menggunakan Syariat Islam tidak dapat dipergunakan lagi dan diganti dengan undang-undang sipil yang diadopsi dari hukum Swiss. Peraturan tentang diwajibkannya penggunaan marga bagi setiap masyarakat Turki dimunculkan oleh Atatürk, sehingga nama-nama gelar seperti Kamal, Ghazi, Pasha, Bey, Shaikh, Effendi, Hanim haruslah dilarang. Pada 1928, Majelis Nasional Agung Turki mengesahkan pertauran terkait pengadopsian dan penerapan huruf Latin. Pada Tahun 1932. aturan tersebut disusul dengan pelaksanaan pemurnian bahasa Turki dari dominasi unsur-unsur bahasa Arab dan Persia. (Freely, 2002, hal. 379)

Proyek Kemalis telah mengembangkan sistem sekularisme yang rumit untuk tujuan "mengendalikan" agama dan mereduksinya menjadi iman terhadap individu. Sekularisme Turki, oleh karena itu, hanya dapat dipahami dalam konteks proyek pembangunan bangsa modern Turki. Islam sebagai agama tidak menjadi bagian dari dengan artian negara dan agama yang terpisah. Ia berusaha mengatur kehidupan publik dengan konsepsi hukum miliknya sendiri dan memberikan alternatif rasa loyalitas, identitas dan komunitas. Aspek-aspek ideologis dan historis menginformasikan Pemahaman Kemalis tentang sekularisme dan kepekaan yang meningkat terhadap segala bentuk klaim berbasis Islam. (Yavuz M. , 2009, hal. 26)

Kemalisme adalah ideologi yang bertujuan otonomi negara dari kekuatan domestik dan internasional dengan tujuan menciptakan modern yang dapat diartikan sebagai negara sekuler dan homogen (Turki). Kemalis merupakan penjaga negara, militer Turki, juga menjadi wali bangsa dan modernisasi. Mereka tidak pernah ragu untuk melindungi negara dari kekuatan sosial, jika perlu dengan merebut kekuasaan. (Yavuz M. , 2009, hal. 27)

Tujuan utama Mustafa Kemal bukan untuk menghilangkan agama tetapi untuk menciptakan seperangkat institusi dan sistem hukum untuk "mengendalikan," "menggunakan" dan "menemukan kembali" Islam, jika perlu, untuk kemajuan kepentingan nasional dan negara. Negara melarang partai atau sosial kelompok, seperti perintah sufi, yang didasarkan pada identitas agama atau didirikan untuk mempromosikan kepentingan agama. Apalagi tidak ada simbol Islam atau bahasa ditoleransi dalam bidang politik, yang juga disusun oleh negara. Tugas negara adalah mengatur dan membentuk kebutuhan agama rakyat sesuai dengan sekuler negara sendiri alam. Ada kendala militer-hukum yang rumit terhadap politisasi Islam. Namun negara juga mempertahankan keterbukaan, kompetitif sistem politik selama partai-partai bekerja dalam batas-batas doktrin Kemalis (Yavuz M. , 2009, hal. 38)

Nilai-nilai kemalisme yang menjadi pintu masuknya sekularisme di Turki memunculkan pertentangan di golongan-golongan yang berlandaskan Islam. Muncul wacana pemurnian nilai-nilai islam di tubuh pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat Turki. Pada Agustus 2001, sektor reformis dan muda dari FP, dipimpin oleh Abdullah Gül, membentuk AKP dengan dukungan dari kebangkitan borjuis Anatolian. Adalet ve Kalkınma Partisi (Partai Keadilan dan Pembangunan) juga disebut Ak Parti yang berarti pihak "murni" atau "tidak terkontaminasi" membedakan dirinya dari partai politik lain, yang diduga terlibat dalam korupsi yang meluas sebelum pemilu 2002. Partai berkomitmen untuk tidak

menggunakan Islam untuk tujuan politik dan mengakhiri kebijakan konfrontasional Islam. (Yavuz M. , 2009, hal. 79)

Sekularisme yang diterapkan Turki pada awal pendirian Republik Turki menjadi orientasi utama dalam kebijakan Erdogan untuk menanamkan kembali semangat Islam di dalam kehidupan bangsa dan bernegara masyarakat Turki. Arah baru Erdogan sebagian terkandung dalam kebijakan AKP yang sekarang terkenal, "*Zero Problem with Neighbors*". Dengan pendekatan ini, Turki tidak hanya akan merangkul negara-negara imperial Turki yang sebelumnya dipimpin Sunni, tapi juga Islam yang lebih luas di dunia. Ini termasuk Iran yang dipimpin Syiah dan Suriah yang dipimpin Syiah, dua tetangga yang paling banyak diidentifikasi dengan permusuhan ideologis ke Barat

Saat sekularisme mulai luntur pengaruhnya di Turki, muncul upaya kembali untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Turki agar kembali pada tatakelola pemerintah yang dekat dengan nilai agama. Semua siswa Turki dari kelas 4 hingga sekolah menengah dan menengah, baik publik atau swasta, diharuskan untuk mengambil kursus berjudul "Budaya Agama dan Pengetahuan Etis". Kursus ini dilakukan seminggu sekali dengan buku teks disetujui oleh Departemen Kebudayaan. Meskipun secara teori tentu saja diharapkan menjaga garis antara mengajar tentang agama secara umum dan mengajar Islam pada khususnya, dalam praktiknya itu menjadi kesempatan untuk mengajarkan agama Islam iman. Pemeriksaan empat buku teks yang banyak digunakan dalam wajib ini kursus mengungkapkan bahwa bab-bab menekankan lima tema : Pertama, agama-agama utama dunia; kedua, sejarah Islam dan kehidupan Nabi Muhammad; ketiga, tatacara pelaksanaan ibadah dalam Islam; keempat, peran agama dalam sejarah Turki; dan kelima, Etika Islam dan tata krama yang baik. Buku pelajaran tersebut gagal memperhitungkan terkait perbedaan sektarian Muslim dan ditulis dari perspektif Sunni. Itu bagian tentang peran Islam dalam sejarah Turki berusaha untuk memadukan nasionalisme

Turki dengan Islam. Orang-orang Turki disajikan sebagai pembela Islam dan cinta tanah air yang disamakan dengan cinta iman.

Erdogan sebagai pribadi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman yang dalam upayanya membersihkan tatakelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat Turki yang sekuler juga mendapat pengaruh dari teman koalisinya yaitu Fethullah Gulen. Interpretasi Islam ini terdiri dari Sufisme Anatolia dan pragmatis budaya politik negara-sentris dari Turki Utsmani. Dengan berargumen bahwa di sana berbagai pemahaman Islam khususnya untuk masing-masing negara dan wilayah, Gulen dengan tepat melayani proyek negara untuk mencoba menasionalisasi Islam. Dia berpendapat: "*Saya tidak pernah berpikir identitas Turki saya terisolasi dari identitas agama saya. Saya selalu berpikir itu berdampingan dengan agamaku. Saya tidak melihat mereka dalam kontradiksi.*" Gulen berpendapat bahwa "*negara dan bangsa harus dilebur menjadi satu.*" Pemikiran politik Gulen, dipengaruhi oleh negara-sentris Budaya Ottoman dan nasionalisme Turki-Islam, menjadi sangat jelas dalam pernyataannya pada pertanyaan Alevi dan masalah Kurdi.

## **B. Persepsi Erdogan terhadap krisis diplomatik Qatar**

Dengan nilai erdogan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman ditunjukkan dengan keprihatinannya terhadap krisis yang menimpa Qatar. Dukungannya kepada Qatar ditunjukkan dengan bantuan yang diberikan kepada Qatar. Erdogan menyatakan, "*Mengasingkan warga sebuah bangsa - dari makanan hingga perjalanan mereka, dari perdagangan hingga agama mereka- adalah tidak manusiawi dan berlawanan dengan nilai-nilai Islami.*" (BBC, 2017b)

Seperti yang dilansir Anadolu, Erdogan juga menyatakan, "*Muslim tidak perlu berselisih (melawan satu sama lain) tapi menunjukkan solidaritas dan saling mendekat. Untuk alasan ini, kita harus berusaha menemukan cara untuk secara jujur dan tulus membicarakan masalah kita.*" (Panjimas, 2017)

Erdogan terus mendesak negara-negara yang mengembargo Qatar terutama Arab Saudi untuk meredakan ketegangan dan mengakhiri krisis diplomatik. *"Adalah salah untuk menambahkan lebih banyak masalah di atas segalanya dalam istilah bahwa dunia Muslim sudah berjuang dengan banyak masalah,"*. *"Saya memanggil Anda (Saudi): Tidak akan ada pemenang dalam perkelahian di antara saudara."* (Muhaimin, 2017)

Dilansir oleh Al Jazeera (10/6/2017) Erdogan juga memberikan pesan kepada Arab Saudi untuk mempersatukan saudara-saudara muslimnya dan bukanlah mengucilkannya. *"Anda harus bekerja untuk menyatukan saudara. Inilah yang kami harapkan dari Saudi, Penjaga Dua Masjid Suci (di Makkah dan Madinah)."*

Pada tanggal 7 Juni 2017, Erdogan telah menyetujui undang-undang yang membahas terkait perizinan untuk mengirimkan pasukan Turki ke Qatar. Menurut Ahmet Demirok yang merupakan Duta Besar Turki untuk Qatar, sekitar 3.000 tentara pasukan darat, tentara angkatan udara dan angkatan laut negara tersebut, serta instruktur dan pasukan khusus, akan ditempatkan di markas Turki yang terletak di Qatar. Turki yang memiliki kepentingan dengan pangkalan militer negaranya di Doha siap untuk mendukung sikap Qatar. Moralitasnya dalam hubungan luar negeri juga sangat dijunjung, hal inilah yang menjadi perhatian dalam kebijakan politik luar negeri negaranya.

Turki menyatakan siap mendukung Qatar atas embargo yang diberikan negara-negara Teluk Arab. Dukungan yang diberikan Turki kepada Qatar merupakan bentuk pelaksanaan atas disetujuinya RUU Turki yang memungkinkan pasukan militer Erdogan mendukung Qatar. Keputusan itu sebagai bentuk dukungan pemerintah Turki terhadap pemerintahan Qatar. Persetujuan RUU itu mendapat dukungan 240 suara. Dukungan terbesar atas persetujuan RUU tersebut berasal dari Partai AK yang merupakan parati penguasa parlemen dan

oposisi nasionalis MHP. Sebelumnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam Arab Saudi. Erdogan menyebut sikap Raja Arab merupakan tindakan yang tidak tepat dan melanggar kedaulatan Qatar. Erdogan menyatakan, Turki akan terus membina hubungan dengan Qatar dan sanksi terhadap Qatar bukanlah sebuah solusi (Tagar, 2017)

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan sepakat atas hasil legislasi terkait pengerahan pasukan Turki ke Qatar. Langkah ini disebut sebagai bentuk dukungan dari Turki untuk negara yang tengah dilanda krisis tersebut diplomatik tersebut. Proses legislasi tersebut rampung usai dipublikasikan media resmi pemerintah, menyusul pengumuman dari Kantor Presiden. Undang-undang tersebut baru ditujukan oleh parlemen pada Rabu lalu Erdogan langsung menyetujuiinya.

Setelah pengerahan awal pasukan Turki di sebuah pangkalan di Doha, pesawat tempur dan kapal perang juga ikut dikirimkan. Menurut berita Hurriyet menuliskan bahwa jumlah pesawat tempur dan kapal perang Turki yang akan dikirim ke pangkalan dipastikan usai persiapan laporan berdasarkan peninjauan awal di sana. Sementara itu, Ankara akan mengirim delegasi ke Qatar dalam beberapa hari mendatang. Mereka akan ke pangkalan untuk meninjau situasi di sana. Diperkirakan ada sekitar 200 hingga 250 tentara dalam waktu dua bulan di tahap awal.

Erdogan menjelaskan bahwa upaya melakukan isolasi kepada Qatar tidak akan menyelesaikan masalah regional. Ia juga berjanji akan melakukan segala upaya untuk membantu mengakhiri krisis regional. Pada Jumat 9 juni 2017, Erdogan menyatakan akan terus bersama Qatar dan tidak akan pernah meninggalkan Qatar. Pernyataan tersebut disampaikan kepada anggota Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) saat acara makan malam di Istanbul.

Turki menerima hasil dari dukungannya kepada Qatar. Nilai tukar mata uang Lira terjun bebas hingga 17% ke level terendah yang merupakan level terendah sepanjang masa. Krisis yang terjadi mendapat perhatian dari Qatar yang sebelumnya didukung Turki pada krisis diplomatik di Teluk Arab pada 2017. Pada Rabu, 15 Agustus 2018, pemerintah Qatar resmi memberikan bantuan sebesar \$15 miliar ke pasar keuangan dan perbankan Turki. Menurut Emir Qatar yaitu Skheih Tamin bin Hamid Al Thani, bantuan yang diberikan merupakan wujud solidaritas. Pasca bantuan yang diberikan oleh Qatar, mata uang Lira menguat hingga 5,90 poin terhadap Dollar. (Faisal, 2018)

Pengaruh Ikhwanul Muslimin juga menjadi alasan keberpihakan Erdogan kepada Qatar. Kedekatan Erdogan dan Ikhwanul Muslimin diperkuat saat terjadinya pergolakan politik di Mesir pada tahun 2013. Ikhwanul Muslimin tidak sepenuhnya tanpa dukungan tokoh daerah yang berasal pada tingkat negara. Reaksi Turki terhadap pemerintahan Ikhwanul Muslimin yang baru yang paling positif di antara yang lain. Diskursus kebijakan luar negeri yang dibangun antara Ikhwanul Muslimin Mesir dan *Adalet ve Kalkınma* dari Turki Partisi (AKP) tumpang tindih, dengan keduanya mengambil pandangan bahwa pihak partai-partai "Muslim" datang berkuasa dalam pemilihan demokratis akan secara alami mengarah pada negosiasi ulang kepada negara yang dianggap sebagai aktor paling berpengaruh di wilayah tersebut. AKP dicari untuk menggambarkan Turki dan Mesir sebagai mitra dalam "poros demokrasi" yang muncul yang dimana akan menetapkan kedua negara sebagai pemimpin kekuatan di wilayah tersebut. Awalnya ada antusiasme yang nyata di Mesir terhadap Model Turki, khususnya mengenai kubu demokrasi, konstitusional reformasi, dan berkurangnya peran tentara dalam dunia politik. Namun, ini tidak bertahan lama. Sekularisme yang diterapkan oleh pemerintah Turki merupakan hal tidak dapat diterima oleh Ikhwan dan untuk Salafi Mesir.

Meskipun Robert Malley, dkk., Berpendapat bahwa “model Turki semakin menjadi apa yang orang lihat” Ikhwanul Muslimin segera mulai menyarankan bahwa Sekularisme yang menjadi model pemerintahan Turki tidak pantas untuk Mesir. Model itu lebih jauh dirusak oleh tanggapan pemerintah Turki untuk protes di Taksim Square selama musim panas 2013. Ini memastikan bahwa Turki bukan lagi pasangan yang menarik; legitimasi itu diperoleh dari demokrasi dan anti-otoritarianisme telah rusak. (Monier & Ranko, 2013)

Dalam peristiwa krisis diplomatik yang disebabkan klaim atas Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok terorisme, Erdogan menyatakan dukungannya kepada Ikhwanul Muslimin. Ia tidak menganggap Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris karena ia bukan kelompok bersenjata, sebaliknya ia hanya sebuah organisasi ideologi.

*“Tidak ada toleransi terhadap Ikhwanul Muslimin di Turki jika mereka mempunyai kaitan dengan terorisme, dan kami tidak pernah melihat atau mengamati apapun tindakan mereka yang menunjukkan ke arah itu (terorisme),”*

Erdogan juga membantah bahwa Ikhwanul Muslimin bergerak dalam aksi-aksi terorisme. Ia mengatakan, “*Secara pribadi, saya tidak menganggap Ikhwanul Muslimin sebuah organisasi teroris karena ia bukan kelompok bersenjata, tetapi pada hakikatnya sebuah organisasi ideologi*”. Menurut Erdogan selama ini ia belum pernah melihat aktivitas Ikhwanul Muslimin yang bersinggungan dengan aktivitas kelompok bersenjata. “*Jika ada, maka pemahaman saya terhadap mereka adalah sama dengan anggapan saya terhadap setiap kelompok teroris. Adalah tidak tepat jika memperlakukan mereka sebagai kelompok teroris*”. (Jones D., 2013)

Pengaruh Ikhwanul Muslimin juga hadir dalam tubuh partai AKP. AKP mengusung tujuan untuk mengembalikan supremasi Islam Ottoman dan menghancurkan sistem sekularisme di Turki. Semangat AKP tersebut mendapat respon yang sangat baik di masyarakat Turki. Pemilu 2002 merupakan terobosan historis dalam hal penyediaan kesempatan sosial untuk Partai Muslim untuk merestrukturisasi gambaran politik dan memperluas ruang publik. Di antara 18 partai yang bersaing memperebutkan kursi di Parlemen, hanya dua yang benar-benar memenangkan kursi karena sebuah partai diharuskan untuk memperoleh 10 persen suara nasional untuk dapat mengirim perwakilan ke Parlemen. AKP masuk ke parlemen dengan memenangkan 34,26 persen suara rakyat dan 363 dari 550 kursi di Parlemen. CHP juga mengerahkan hampir 19,40 persen suara dan 178 kursi. Kandidat independen memenangkan sembilan lainnya tempat duduk. Hasil pemilu mewakili penolakan rakyat yang otoriter kemapanan politik. Sejumlah besar pemilih percaya pada AKP, atau paling tidak bersedia mengambil risiko untuk perubahan politik yang lebih luas. Pemilu yang telah dilaksanakan menyingkirkan satu generasi politisi mapan, memberi AKP mayoritas kursi dan hak untuk membentuk pemerintahan sendiri. Seseorang juga dapat melihat pemilihan ini sebagai pemulihan gerakan Islam yang dipaksa keluar dari kekuasaan di Kudeta 1997. Dengan demikian pemilu secara signifikan mengubah pendirian politik dan membawa AKP ke kekuasaan dengan mandat yang jelas untuk mengembalikan pusat politik dalam hal nilai-nilai sosial. Bahkan, mayoritas pemilih sedang mencari kontrak sosial baru berdasarkan wacana demokrasi global, hak asasi manusia, dan keadilan sosial, prinsip-prinsip etika yang mendasarinya kontrak semacam itu. (Yavuz M. H., 2003, hal. 256)

Pemilu 2002 dengan demikian bukan tentang mendirikan negara Islam atau melembagakan Hukum Islam tetapi lebih tentang menggambar ulang batas antara negara dan masyarakat, mengkonsolidasikan masyarakat sipil, dan

membangun kembali kehidupan sehari-hari dari visi bersama tentang "kehidupan yang baik." Mayoritas pemilih berharap untuk menciptakan moral kehidupan modern dan partisipatif yang adil di mana masyarakat sipil bertanggung jawab nasibnya sendiri. Sektor masyarakat yang dikucilkan dan terpinggirkan, bersama dengan mereka yang berharap untuk memperluas ruang kesempatan, ingin para pemimpin mereka membuat politik keputusan yang secara inheren berbagi bahasa moral mereka mengacu pada arti hidup yang baik. Gagasan Muslim tentang diri batiniah yang mampu memprakarsai perlawanan dan menghasilkan perbedaan pendapat imajinatif dari praktik sosial memberikan sanksi agama untuk nilai-nilai sipil. Terlepas dari terobosan sekularisme Kemalis, masih ada hubungan kuat antara Islam dan etos etis yang menginformasikan kehidupan sehari-hari di Turki. Seiring berjalannya waktu, kedekatan telah berkembang antara nilai-nilai tertentu dan minat tertentu, dan lokasi kelas ini harus diperhitungkan dalam pemeriksaan hasil pemilu.

Dalam transformasi gerakan Islam secara umum, dan pemilihan kemenangan AKP khususnya, kelas urban "baru", yang terdiri dari secara horizontal menghubungkan kelompok berbasis solidaritas dengan asal-usul pedesaan dan berbagi nilai Islam, memainkan peran penting. Kelas urban "baru" ini telah dikecualikan secara budaya dan secara ekonomi oleh elit Kemalis. Segmen yang dikecualikan dari populasi menggunakan idiom dan jaringan Islam untuk mengatasi pengucilan mereka. Dengan demikian jaringan Islam memfasilitasi integrasi kelompok ini ke dalam modern ruang peluang dan menawarkannya harapan untuk mobilisasi sosial. (Yavuz M. H., 2003, hal. 257)

Hubungan kekerabatan ideologis antara Ikhwanul Muslimin dan AKP berakar pada perkembangan historis AKP. Sejak didirikan pada 1960-an, gerakan Pandangan Nasional, gerakan Islamis politik Turki dari mana AKP muncul, melihat dirinya sebagai bagian dari jaringan yang lebih besar dari gerakan Islamis. Ini paling jelas dalam kasus Partai

Kesejahteraan, yang didirikan pada tahun 1983 dan memerintah pada tahun 1996 dan 1997 sebagai mitra koalisi yang dominan - dan pemerintah Turki pertama yang dipimpin Islamis - sampai Mahkamah Konstitusi menggulingkannya atas dasar anti- kegiatan sekuler dalam "kudeta pasca-modern" Februari 1997. Kongres Partai Kesejahteraan pada tahun 1993 dan 1996 termasuk perwakilan Ikhwanul Muslimin dari Mesir dan Tunisia, dan partai itu bahkan mencoba menengahi antara Ikhwanul Muslimin dan rezim Mubarak pada tahun 1996. Politik semacam itu tawaran sebagian besar didukung oleh visi kebijakan luar negeri partai, di mana Turki dipandang sebagai pemimpin politik dunia Muslim yang lebih besar. (Aydin-DÜzgit, 2014)

Meskipun Erdogan berusaha menunjukkan citra Islam yang beradab, berdasarkan ajaran Sufi dari Shamsuddin al-Tabrizi dan Jalaluddin Rumi, para Islamis Turki terpesona oleh pengalaman Mesir sampai-sampai mereka mulai menerjemahkan huruf-huruf Hassan al-Banna, yang mendirikan Persaudaraan Muslim Mesir, dan ajaran ahli teori Islam abad ke-20 Sayyid Qutb.

Bahkan partai Keadilan dan Pembangunan, sampai batas tertentu, dianggap sebagai faksi Ikhwanul Muslimin, memberikan peluang bisnis kepada pengusaha Ikhwan misalnya. rdogan adalah pengikut terbuka dari master Islamis di Turki, Necmettin Erbakan. Di era itu, banyak pemimpin Ikhwan pindah ke Turki yang meluncurkan "rekonsiliasi bersejarah" antara rezim Suriah dan Mesir dan Ikhwan. Ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang menguntungkan untuk membentuk cabang-cabang Persaudaraan, yang sebelumnya keberhasilan sebelum *Arab Spring* tak banyak dicapai. (Kader, 2013)

Menurut (Aydin-DÜzgit, 2014) hubungan AKP dengan Ikhwanul Muslimin telah terombang-ambing tergantung pada konteks sejak awal, namun. Ketika AKP berkuasa pada tahun 2002, sebagai partai sempalan dari mantan Partai

Kesejahteraan, awalnya meremehkan hubungan dekat dan afinitas dengan MB untuk muncul sebagai kekuatan politik sentris di mata pemilih dan pembentukan sekuler, khususnya peradilan dan militer. Dalam masa jabatan pertamanya di pemerintahan, garis kebijakan luar negeri AKP sangat terfokus pada proses akses UE Turki, penyelarasan kebijakan luar negeri dengan Amerika Serikat, dan integrasi lebih lanjut negara itu ke dalam ekonomi global — karena langkah-langkah ini dipandang bermanfaat bagi partai. berjuang melawan kekuatan sekuler negara itu dan perlu memastikan kelangsungan politiknya.

Pendulum berayun ke arah lain setelah pemilihan umum 2007, ketika AKP memperoleh mandat yang lebih kuat, partai bergerak lebih dekat ke Ikhwanul Muslimin. Bahkan, ketika Timur Tengah semakin menjadi titik rujukan utama dalam kebijakan luar negeri Turki, hubungan dengan Ikhwanul mulai menempati peran sentral dalam penjangkauan Turki ke wilayah yang lebih luas. Berbagai faktor mendorong pendirian ini, seperti keinginan AKP untuk menetapkan Turki sebagai kekuatan regional di Timur Tengah dan memperluas pasar ekspor Turki di wilayah tersebut. Itu didukung oleh ideologi lama, kadang-kadang disebut sebagai neo-Ottomanisme, yang menafsirkan Timur Tengah sebagai historis, budaya, dan agama yang terhubung ke Turki karena warisan bersama Ottoman. Menurut visi ini, garis kebijakan luar negeri Kemalists yang sebelumnya dominan adalah satu dimensi, dengan fokus berlebihan pada Barat dengan mengorbankan Timur Tengah. Lingkungan domestik pasca-triumphalisme AKP reseptif terhadap kebutuhan Turki untuk berhubungan kembali dengan warisan Ottomannya.

AKP tidak lagi mengkhawatirkan oposisi militer (dengan banyak pejabat militer terkemuka diadili atau dipenjara karena percobaan kudeta) atau pembentukan yudisial (diberikan langkah-langkah utama untuk membatasi peradilan melalui referendum konstitusi pada 2010). Konteks eksternal, di mana hubungan Turki dengan Uni Eropa memburuk

menyusul ketidaksepakatan tentang Siprus pada tahun 2006, juga berkontribusi pada perubahan prioritas kebijakan luar negeri ke Timur Tengah dan memperkuat hubungan dengan Ikhwanul Muslimin.

Titik balik krusial dalam pelukan AKP dari Ikhwanul Muslimin, datang dengan perang Israel di Gaza pada 2008-2009. Setelah pemboman Israel di Jalur Gaza, AKP mengadopsi wacana yang semakin anti-Israel dan bergerak lebih dekat ke arah Ikhwanul Muslimin dan Hamas. Tujuan utamanya adalah untuk mengkompensasi kelambanan relatif dari rezim otoriter sekuler di wilayah ini pada masalah Palestina dan menunjukkan peran kepemimpinannya di wilayah yang lebih luas. Garis ini juga melayani tujuan domestik yang penting menjelang pemilihan umum 2011, dengan AKP menggunakan masalah Palestina untuk menuduh oposisi menjadi pro-Israel, terutama dalam debat domestik tentang serangan mematikan Mei 2010 dari serangan bantuan Turki armada yang telah berusaha untuk menghancurkan blokade Israel di Gaza.

Menurut (Aydin-DÜzgit, 2014) Menjelang pemilihan presiden 2012, Erdogan melihat Mohamed Morsi di MB sebagai mitra strategis potensial yang dapat membantunya meningkatkan pengaruhnya dalam konflik Israel-Palestina dan melanjutkan tujuannya untuk menjadi pemimpin regional. AKP mengirim para ahli kampanye dan penasihat kampanye untuk membantu Morsi dan MB dalam pemilihan Mesir, dan AKP menyambut pemilihan Morsi pada 2012 dengan antusias dan sebagai keberhasilan kebijakan luar negeri.

Baik pemimpin Morsi dan Hamas Khaled Mashal telah menghadiri kongres partai AKP pada 2012, di mana Morsi juga menyampaikan pidato berterima kasih kepada pemerintah Turki atas dukungannya selama pemberontakan Lapangan Tahrir. Demonstrasi terbuka mengenai hubungan antara AKP dan Ikhwanul Muslimin ini sangat kontras dengan penerimaan rahasia yang diberikan pemerintah Turki kepada Mashal

setelah pemilihan umum Palestina pada tahun 2006 (hanya untuk diekspos oleh media), menunjukkan pergeseran strategi yang jelas dalam Timur Tengah dan dalam hubungan AKP dengan Ikhwanul Muslimin. Dengan kunjungannya ke Mesir pada Februari 2013, Gul menjadi pemimpin asing pertama yang mengunjungi pemerintahan Morsi.

Merangkul Ikhwanul Muslimin juga menyiratkan kerja sama dengan Qatar, sekutu utama di wilayah yang berbagi pandangan positif tentang Ikhwanul Muslimin. Pemerintah Turki dan Qatar bertemu beberapa kali selama dan setelah pemberontakan Arab pada tahun 2011 dan menyerukan peningkatan hubungan politik, militer, dan ekonomi sebagai "anggota budaya dan peradaban bersama." 1Kunjungan bilateral meningkat pada 2012, dan hubungan politik, dalam kata-kata Menteri Luar Negeri Ahmet Davutoğlu, "mencapai tingkat tertinggi" pada isu-isu yang tidak hanya mencakup MB, tetapi juga krisis Suriah.

Menurut (Al-Saleh, 2017) kehadiran Ikhwanul Muslimin di Qatar dibawa oleh Yusuf Al-Qardhawi saat ia datang ke Qatar. Kedatangan Yusuf Al-Qardhawi ke Qatar merupakan bagian dari gelombang perpindahan Ikhwanul Muslimin ke negara-negara Teluk saat kepemimpinan Gamal Abdel Naseer pada tahun 1961. Ia kemudian diberikan kewarganegaraan Qatar oleh pemerintah Qatar.

Al-Qardhawi menerbitkan dalam memoarnya tentang masa awalnya di Qatar: "Sejak pidato pertama yang saya berikan di sekolah menengah pada kesempatan pemisahan Suriah dari Mesir, pidato tersebut bersifat politis. Beginilah cara publik diperkenalkan kepada saya sebagai pendatang baru. Segera Syekh Ibnu Turki mengundang saya untuk memperingati acara Isra dan Mi'raj selama sekolah menengah. Setiap kali ada acara keagamaan, nasional atau sosial, saya diundang untuk berpartisipasi di dalamnya."

Setelah Ramadhan pertama Qaradawi di Qatar, ia mampu menempatkan dirinya di antara elit politik Qatar. Ini adalah sesuatu yang selalu ingin dicapai oleh Ikhwanul Muslimin dengan mengikuti pedoman al-Banna sendiri. Qardhawi berkata,

*“Ketika Ramadhan pertama datang ketika saya berada di Qatar, Khalifa bin Hamad, Putra Mahkota dan Wakil Gubernur mengundang saya ke istananya di mana rumah dan kantornya berada. Saya akan memimpin Syaikh untuk shalat Ashar, dan kemudian memberinya pelajaran tentang arti sebuah ayat atau ceramah tentang topik atau acara tertentu, seperti Pertempuran Badr, penyerahan Mekah atau Lilat al-Qadr. Sheikh Khalifa ingin sekali menghadiri dan tidak pernah melewatkan sesi-sesi itu kecuali karena sakit. Di masjid ini saya bertemu sejumlah teman termasuk: Sheikh Salman bin Jassim, yang datang dari Umm Qarn, Sheikh Khalid bin Hamad, salah satu saudara dari Sheikh Khalifa, dengan siapa saya menjadi teman dekat, dia dulu berasal dari daerah tua Rayyan, ”*

Al-Qaradawi yang merupakan kepala Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional, menyoroti statusnya dibandingkan dengan cendekiawan Qatar lainnya, dan mereka yang di seluruh dunia Arab pada umumnya. Hubungannya dengan pejabat Qatar memperkuat kehadirannya di Qatar.

*“Pengaturan yang dibuat Ibn Turki untuk saya adalah bahwa saya akan pergi ke masjid selama setengah bulan, dan sisa bulan lainnya seorang pendidik akan memberikan pelajaran. Tetapi Syaikh Khalifa memanggil putra Syaikh Turki lalu berkata kepadanya: Mengapa Anda mengubah Qaradawi? Dia berkata untuk melakukan diversifikasi. Dia mengatakan kepadanya, saya tidak ingin diversifikasi, saya tidak ingin yang lain selain al-Qaradawi.”*

*“Saya kembali ke Masjid Sheikh Khalifa dan kemudian ketika Sheikh memindahkan istananya ke Al Rayyan, dan menjadi penguasa Qatar, dia mengganti masjid Al Rayyan dengan masjid di dalam istananya. Hanya elit yang bisa datang kepadanya berdasarkan instruksi dari petugas keamanannya. Syekh tetap tertarik untuk menghadiri kuliah saya dan terus melakukannya sampai putranya Sheikh Hamad menjadi penguasa. Ini berlangsung selama 36 tahun selama bulan Ramadhan, dengan pengecualian satu bulan suci yang saya lewatkan.”*

Keadaan mendalam Ikhwanul Muslim di Qatar tidak hanya dicapai dengan berbaur dengan keluarga yang berkuasa dan cabang-cabangnya, tetapi juga melalui undangan yang dilakukan Qardhawi ke teman-temannya dan teman-teman Ikhwanul Musliminnya yang dipenjara serta memberi mereka kontrak kerja di Qatar. Hal seperti itu memungkinkan Ikhwanul Muslimin untuk mengintensifkan kegiatan mereka dan menyebarkan gerakan politik mereka dalam struktur sosial-politik di Qatar.

Al-Qardhawi berkata: *“Saya memiliki latihan lain selain pelajaran reguler saya selama shalat Al Asr, yaitu melakukan shalat Tarawih. Anggota Ahmad Al-Assal menyarankan agar kami membaca bagian penuh dari Quran setiap malam selama sholat Tarawih selama Ramadhan sehingga kami menyelesaikannya pada akhir bulan seperti yang biasa kami lakukan ketika kami berada di penjara militer. Kami menahannya di masjid sebelah dengan dukungan saudara-saudara Azhari seperti Sheikh Abdul Latif Zayed dan Sheikh Mohammed Mahdi dan Sheikh Abdul Mohsen Musa dan Sheikh Sayed Ragab.”*

Qardhawi melanjutkan, *“Kami menjadi imam shalat pada setengah barisan-barisan dari orang-orang yang sholat di masjid kecil ini, dan dalam beberapa hari jumlah jamaah*

*berlipat ganda, terutama orang Mesir, Palestina, Pakistan, dan India,"*

Di antara nama-nama terkemuka di Ikhwanul Muslimin yang dibawa al-Qaradawi adalah Hassan Issa Abdel-Zaher, yang terkenal dengan penelitiannya, yang berhubungan dengan Abu al-A'ala al-Mawdoudi (*the spiritual father of the movements of political Islam and lecturer of the principles of governance and ignorance*), merupakan penelitian pertama yang dilakukan tentang al-Mawdoudi sejak kematiannya. Penelitian itu berjudul "Abu al-A'ala al-Mawdoudi dan setengah abad Jihad dalam Islam". Dia mengenal Abdel-Zaher, yang menetap di Qatar pada tahun 1978, setelah dia naik platform masjid Ishaq dan masjid Hessa al-Sweedy dan sampai dia meninggal di Doha.

Ikhwanul Muslimin mengalami perkembangan dalam beberapa tahun. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan, "*Jumlahnya meningkat dan dengan munculnya kebangkitan Islam kontemporer di pertengahan tahun 70-an abad ke-20, jadi kami pindah ke Masjid Al Shoyoukh, masjid terluas terbesar.*"

Dalam kasus pemutusan diplomatik terhadap Qatar negara-negara Teluk Arab meminta agar Qardhawi di ekstradisi ke Mesir namun pihak pemerintah Qatar menolak untuk melakukan ekstradisi. Menteri Luar Negeri Qatar memberi pernyataan, "*Al-Qaradhawi tidak akan diekstradisi karena dia telah menjadi warga negara Qatar sejak tahun 1970an. Dia juga bukan teroris tapi lawan politik yang memiliki sudut pandang berbeda,*" dikutip dari Middle East Monitor, Jumat (29/9/2017). (Berlianto, 2017)

Dalam sikap yang diambil oleh Erdogan untuk berpihak kepada Qatar, penulis menganggap bahwa apa yang telah dilakukan oleh Erdogan sesuai dengan hadist nabi yaitu, dari an-Nu'man bin Basyir dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ  
عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى

“Perumpamaan kaum mukminin dalam cinta-mencintai, sayang-menyayangi dan bahu-membahu, seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain ikut merasakan sakit juga, dengan tidak bisa tidur dan demam”

Erdogan yang merupakan pribadi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman yang dimana dalam kasus keputusan hubungan diplomatik yang dilakukan negara-negara di Teluk Arab terhadap Qatar tidak sesuai dengan semangat menjunjung solidaritas antar umat. Sehingga keberpihakan Erdogan kepada Qatar pada krisis diplomatik di Teluk Arab pada tahun 2017 merupakan bentuk menjalankan nilai-nilai keislaman.